



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PELITA ANDRIANY SIHOMBING
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 233636

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.171.100.000
1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 503.600.000		
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 417.500.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	535.000.000
1. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR ` Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	388.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.605.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	800.000.000
Sub Total	Rp.	8.499.100.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.499.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.